

BAB II

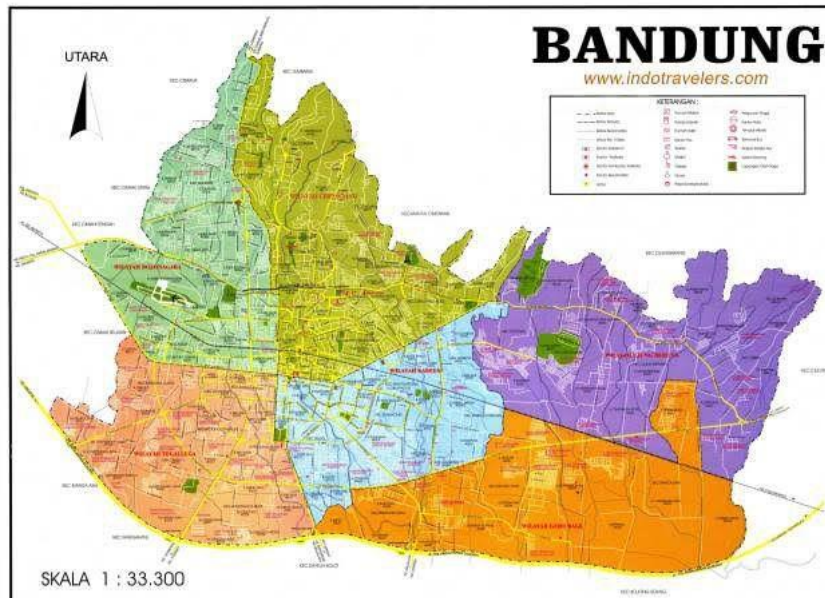
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung merupakan kota metropolitan yang mengalami pertumbuhan penduduk tahunan sekitar 1,06% (BPS Kota Bandung, 2022). Awalnya, Kota Bandung direncanakan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung, tetapi daerah Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) dianggap tidak strategis karena terletak di sisi selatan. Pembangunan Kota Bandung diinisiasi oleh Bupati Bandung saat itu, R.A Wiranatakusumah II, yang juga tercatat sebagai pendiri kota ini. Saat ini, Kota Bandung dipimpin oleh Walikota Yana Mulyana, yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, menjadikannya sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional yang melayani kegiatan berskala internasional, nasional, dan provinsi lainnya.

Dengan pertumbuhan yang pesat dalam sektor sosial, ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur, Kota Bandung menjadi destinasi menarik bagi masyarakat dari kota-kota sekitarnya untuk urbanisasi dalam mencari peluang baru. Akibatnya, jumlah penduduk meningkat pesat, yang berbanding lurus dengan kebutuhan akan lahan pemukiman.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Bandung



Sumber : BPBD Kota Bandung, 2022

Posisi strategis Kota Bandung dapat dilihat dari aspek geografis, keamanan, dan infrastruktur. Kota Bandung memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh berbagai pendatang di sekitarnya karena akses jalan yang baik dari berbagai penjuru Kota/Kabupaten, khususnya di Jawa Barat. Kota Bandung terletak pada beberapa poros jalan raya seperti:

1. Daerah Timur-Barat: mudah akses menuju ibu kota
2. Daerah Selatan-Utara: mudah akses menuju dataran tinggi (perkebunan dan pegunungan) sebagai pusat wisata di Kota Bandung

Kondisi iklim yang sejuk cenderung menuju dingin menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk mengunjungi Kota Bandung. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam Kota Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga secara sekilas morfologi Kota Bandung terlihat seperti mangkok raksasa. Berikut data luas wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung:

Tabel 2.1**Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2023**

Wilayah Kecamatan	Luas	Presentase
Kota Bandung	167,31	100,00
Bandung Kulon	6,46	3,84
Babakan Ciparay	7,45	4,45
Bojongloa kaler	3,03	1,81
Bojongloa kidul	6,26	3,74
Astana anyar	2,89	1,73
Regol	4,30	2,57
Lengkong	5,90	3,53
Bandung kidul	6,06	3,62
Buah batu	7,93	4,74
Ranjasari	7,33	4,38
Gedebage	9,58	5,73
Cibiru	6,32	3,78
Panyileukan	5,10	3,05
Ujung berung	6,40	3,83
Cinambo	3,86	2,20
Arcamanik	5,87	3,51
Antapani	3,79	2,27
Mandalajati	6,67	3,99
Kiaracondong	6,12	3,66
Batununggal	5,03	3,01
Sumur bandung	3,40	2,03
Andir	3,71	2,22
Cicendo	6,86	4,10
Bandung wetan	3,39	2,03
Cibeunying kidul	5,25	3,14
Cibeunying kaler	4,50	2,68
Coblong	7,35	4,39
Sukajadi	4,30	2,57
Sukasari	6,27	3,75
Cidadap	6,12	3,65

Sumber : BPS Kota Bandung, 2023

Luas wilayah kota Bandung adalah 167,31 km² yang terbagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gedebage dengan luas 9,58 km². Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Astanaanyar yaitu dengan luas wilayah 2,89 km².

2.2 Kondisi Geografis Kota Bandung

Kondisi serta perkembangan demografi suatu daerah merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk adalah modal paling dasar dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi yang disertai dengan keseimbangan distribusi penduduk akan mempengaruhi kegiatan sosial, struktur ruang, dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Seluruh aspek pembangunan daerah memiliki hubungan dan interaksi dengan perkembangan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi mengenai demografi memiliki posisi strategis untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim Menurut
Jenis Kelamin di Kota Bandung

Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim Berdasarkan Jenis Kelamin	
Laki-Laki dan Perempuan	
2022	2023
2.461.553	2.469.589

Sumber : BPS Kota Bandung, 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.452.179 jiwa. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01%, sehingga mencapai 2.589.256 jiwa. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2022, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, mencapai 2.527.854 jiwa yang terdiri dari 1.267.661 laki-laki dan 1.260.193 perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, Kota Bandung mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,48%.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bandung meningkat lagi menjadi 2.469.589 jiwa. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 101,4. Pertumbuhan penduduknya konsisten, menjadikan Kota Bandung sebagai daerah terpadat di Jawa Barat. Kondisi geografis yang menguntungkan menjadikan Kota Bandung sebagai pusat perekonomian dan aktivitas sosial lainnya.

Tabel 2.3

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung (Jiwa) 2023

Wilayah Kecamatan	Luas	Presentasi Penduduk	Kepadatan Penduduk
Bandung Kulon	6,46	5,61%	21,78 ribu per km ² .
Babakan Ciparay	7,45	5,76%	19,37 ribu per km ²
Bojongloa kaler	3,03	4,84%	40,05 ribu per km ²
Bojongloa kidul	6,26	3,54%	14,19 ribu per km ²
Astana anyar	2,89	2,78%	24,12 ribu per km ²
Regol	4,30	3,20%	18,65 ribu per km ²
Lengkong	5,90	2,68%	11,37 ribu per km ²
Bandung kidul	6,06	2,46%	10,16 ribu per km ²
Buah batu	7,93	4,16%	13,15 ribu per km ²
Ranjasari	7,33	3,53%	12,06 ribu per km ²
Gedebage	9,58	1,78%	4,66 ribu per km ²
Cibiru	6,32	2,97%	11,78 ribu per km ²
Panyileukan	5,10	1,64%	8,06 ribu per km ²
Ujung berung	6,40	3,75%	14,68 ribu per km ²
Cinambo	3,86	1,04%	7,12 ribu per km ²
Arcamanik	5,87	3,27%	13,97 ribu per km ²
Antapani	3,79	3,29%	21,79 ribu per km ²
Mandalajati	6,67	3,02%	11,37 ribu per km ²
Kiaracondong	6,12	5,12%	20,97 ribu per km ²
Batununggal	5,03	4,67%	23,27 ribu per km ²
Sumur bandung	3,40	1,38%	10,17 ribu per km ²
Andir	3,71	3,91%	26,44 ribu per km ²
Cicendo	6,86	3,73%	13,64 ribu per km ²
Bandung wetan	3,39	1,09%	8,03 ribu per km ²
Cibeunying kidul	5,25	4,37%	20,89 ribu per km ²
Cibeunying kaler	4,50	2,71%	15,11 ribu per km ²
Coblong	7,35	4,45%	15,19 ribu per km ²
Sukajadi	4,30	4,07%	23,72 ribu per km ²
Sukasari	6,27	3,03%	12,10 ribu per km ²
Cidadap	6,12	2,13%	8,74 ribu per km ²

Sumber : BPS KOTA BANDUNG 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay memiliki persentase penduduk sebesar 5,76% dengan kepadatan penduduk mencapai 19,37 ribu per km². Sementara itu, Kecamatan Bojongloa Kaler menonjol sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 40,05 ribu per km².

Kecamatan lainnya seperti Bandung Kulon memiliki persentase penduduk 5,61% dengan kepadatan 21,78 ribu per km², dan Kecamatan Kiaracondong yang memiliki persentase penduduk 5,12% dengan kepadatan 20,97 ribu per km². Kecamatan Astanaanyar memiliki kepadatan 24,12 ribu per km², dan Kecamatan Andir memiliki kepadatan 26,44 ribu per km².

Di sisi lain, beberapa wilayah memiliki kepadatan yang lebih rendah, seperti Gedebage dengan kepadatan 4,66 ribu per km² dan Cinambo dengan kepadatan 7,12 ribu per km². Secara keseluruhan, data ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam kepadatan penduduk di berbagai kecamatan di Kota Bandung.

2.3 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatur dan mengelola sektor perhubungan yang merupakan salah satu sektor vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Sektor perhubungan ini mencakup transportasi darat, laut, dan udara, yang memiliki

peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Peraturan daerah tersebut diikuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 yang memperbarui susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan. Selanjutnya, penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengatur secara lebih rinci mengenai tanggung jawab dan peran dari dinas tersebut dalam mengelola transportasi publik, jalan raya, serta sarana dan prasarana pendukung transportasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, serta pelayanan publik di bidang perhubungan yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, keteraturan, keselamatan, dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat.

2.4 Visi Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan layanan transportasi darat yang profesional dan berkeadilan, demi mendukung mobilitas masyarakat. Dalam upaya ini, kami mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan, serta memastikan aksesibilitas layanan yang berkualitas tinggi. Visi dan misi yang kami tetapkan merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Berikut adalah Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat :

Visi :

Menjadi organisasi pemerintahan yang profesional dan mendukung mobilitas masyarakat melalui layanan transportasi darat yang mengedepankan nilai kemanusiaan, berkeadilan, aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Misi:

1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang aman dan mampu menjangkau masyarakat di seluruh wilayah.
2. Mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Mendorong perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang baik.

Visi dan misi ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat di Jawa Barat.

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan tanggung jawab yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan pelayanan transportasi, Dinas ini bertujuan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di provinsi ini. Melalui

berbagai program dan kebijakan, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang terintegrasi dan meningkatkan keselamatan transportasi bagi semua pengguna.

Berikut adalah Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat:

Tugas Pokok:

1. Pengaturan dan Pengawasan

Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2. Penyelenggaraan Pelayanan

Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Merencanakan dan membangun prasarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat.

Fungsi:

1. Perumusan Kebijakan

Menyusun dan merumuskan kebijakan serta standar pelayanan transportasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2. Pengembangan Sistem Transportasi

Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk moda transportasi umum.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di sektor transportasi.

4. Data dan Informasi

Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkait transportasi untuk pengambilan keputusan.

5. Peningkatan Keselamatan Transportasi

Mengimplementasikan program-program yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi.

6. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.

2.6 UPTD PPP LLAJ WILAYAH II Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

UPTD P3 LLAJ Wilayah II adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. P3 LLAJ sendiri merupakan singkatan dari Pelayanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan. UPTD ini memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan transportasi, mengawasi lalu lintas, dan menegakkan peraturan terkait angkutan jalan di wilayah tertentu.

Tugas dan Fungsi UPTD P3 LLAJ Wilayah II :

1. Pelayanan Transportasi

Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan angkutan umum dan lalu lintas di wilayahnya.

2. Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap operasional angkutan umum, termasuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna.

3. Penegakan Hukum

Menegakkan peraturan lalu lintas dan ketentuan yang berlaku terkait angkutan jalan.

4. Koordinasi

Bekerja sama dengan instansi terkait untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.

UPTD PPP LLAJ Wilayah II memiliki peran yang signifikan dalam mendukung operasional Trans Metro Pasundan (TMP), layanan transportasi umum di Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai unit yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, UPTD P3 LLAJ memastikan bahwa layanan TMP berjalan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang ditetapkan.

Keterkaitan UPTD P3 LLAJ Wilayah II dengan Trans Metro Pasundan

1. Pengawasan Operasional

UPTD P3 LLAJ melakukan pengawasan terhadap armada TMP untuk memastikan bahwa kendaraan beroperasi dalam kondisi yang baik dan

sesuai dengan peraturan lalu lintas. Ini mencakup pemeriksaan berkala terhadap kendaraan, pengemudi, dan fasilitas yang ada.

2. Penegakan Hukum

Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang melibatkan armada TMP, UPTD P3 LLAJ bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan memberikan sanksi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di jalan dan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi.

3. Koordinasi Layanan

UPTD P3 LLAJ juga berperan dalam koordinasi antara TMP dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien. Melalui kolaborasi ini, diharapkan layanan TMP dapat berjalan dengan lebih optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

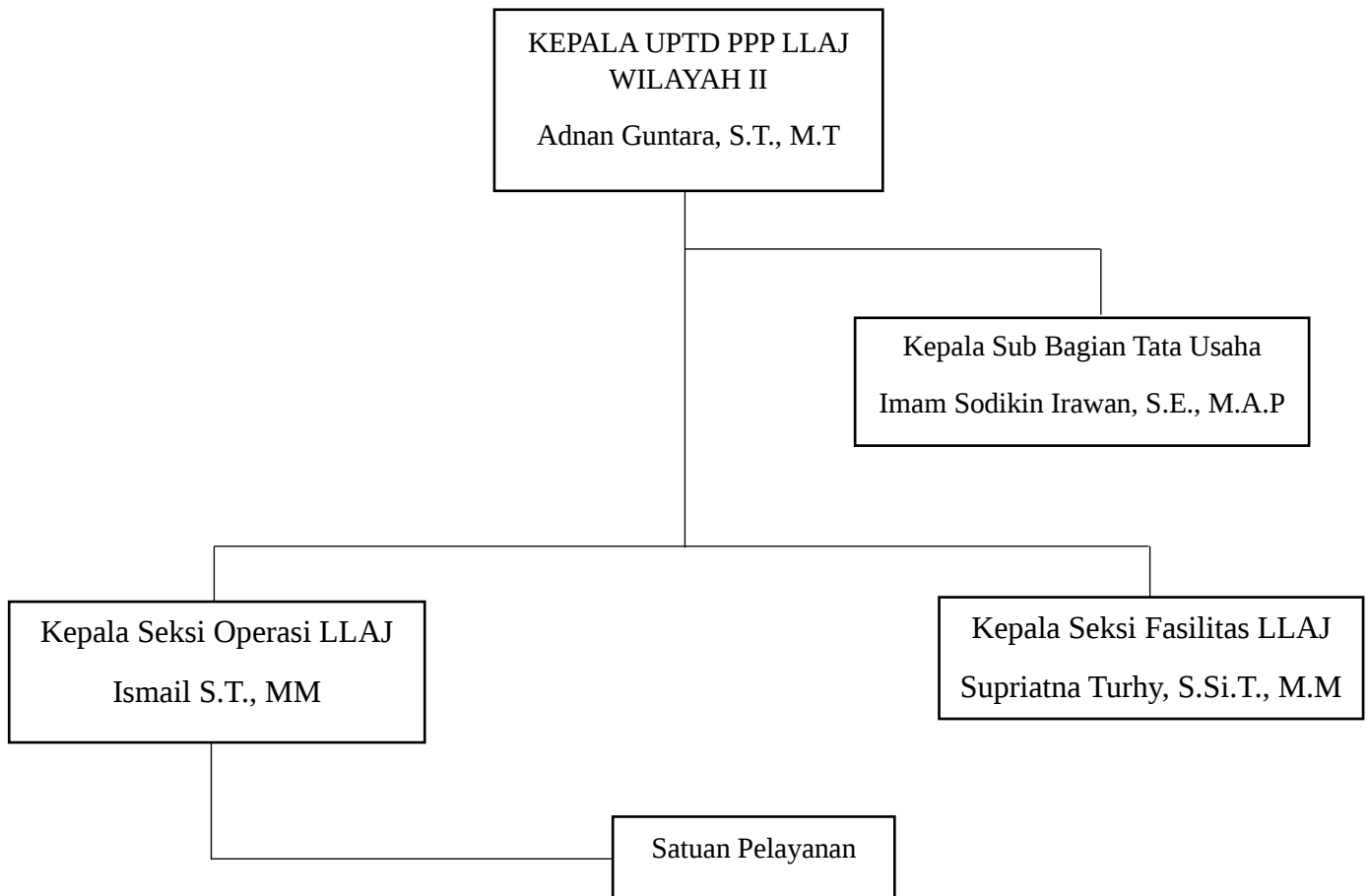
4. Peningkatan Kualitas Layanan

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelayanan TMP, UPTD P3 LLAJ dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem transportasi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Dengan demikian, UPTD P3 LLAJ Wilayah II berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan dan keberlanjutan Trans Metro Pasundan, memastikan bahwa layanan transportasi ini dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Jawa Barat.

2.7 Struktur Organisasi UPTD PPP LLAJ WILAYAH II Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Barat



2.8 Trans Metro Pasundan

Trans Metro Pasundan (TMP) adalah layanan transportasi umum berbasis bus yang beroperasi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Layanan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dengan menyediakan alternatif transportasi yang efisien, aman, dan terjangkau. TMP menghubungkan berbagai daerah strategis seperti pusat bisnis, area pendidikan, dan lokasi wisata, dengan armada bus yang dilengkapi fasilitas nyaman seperti pendingin udara dan sistem

informasi penumpang. Layanan ini beroperasi dengan jadwal teratur dan menggunakan sistem pembayaran berbasis kartu elektronik untuk mempercepat proses boarding.

Trans Metro Pasundan memiliki 5 koridor utama, yaitu:

- Koridor 1: Leuwipanjang - Soreang
- Koridor 2: Kota Baru Parahyangan (Padalarang) - Alun-Alun Kota Bandung
- Koridor 3: Baleendah – BEC
- Koridor 4: Leuwipanjang – Dipatiukur
- Koridor 5: Dipatiukur - Jatinangor (Via TOL)

Namun, saat ini hanya Koridor 2 dan Koridor 3 yang diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Koridor 1, 4, dan 5 masih berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan berperan penting dalam penyelenggaraan TMP melalui kebijakan, regulasi, serta dukungan pendanaan dan bantuan teknis untuk pengembangan infrastruktur. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bertugas mengawasi operasional TMP pada dua koridor tersebut dan terlibat dalam perencanaan rute serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Kementerian Perhubungan berperan penting dalam penyelenggaraan TMP melalui kebijakan dan regulasi yang mengatur semua jenis transportasi di Indonesia, termasuk memberikan dukungan pendanaan dan bantuan teknis untuk pengembangan infrastruktur. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bertugas mengawasi dan mengatur operasional TMP, memastikan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta terlibat dalam perencanaan rute dan pembangunan

infrastruktur pendukung. Selain itu, UPTD P3 LLAJ Wilayah II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasional TMP, memastikan bus beroperasi sesuai dengan peraturan lalu lintas, dan melakukan penegakan hukum dalam hal pelanggaran. UPTD juga berperan dalam koordinasi antara TMP dan instansi terkait lainnya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan. Sinergi antara TMP, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan UPTD P3 LLAJ Wilayah II sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan layanan transportasi ini dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan menciptakan sistem transportasi yang efisien serta berkelanjutan